

## TATA RUANG WILAYAH

2024

PERDAKOTA NO. 7, LD KOTA MAKASSAR 2024 (7) :282 HLM, TLD KOTA MAKASSAR 2024 (4) : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 - 2043

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan; PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang ; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Wilayah Perencanaan dan Ruang lingkup; Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah; Rencana Struktur Ruang Wilayah; Rencana Pola Ruang Wilayah; Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; Kawasan Strategis Kota; Arah Pemanfaatan Ruang Kota; Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota; Peran Masyarakat dan Kelembagaan; Penyidikan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Pidana; Dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan Ruang Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 6 Desember 2024.
  - 295 Halaman.